

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Abu Daud Busro, *Pemeriksaan Keuangan Negara*, Bina Aksara, 1988
- Budi Masthuri, *Mengenal Ombudsman Indonesia*, Pradnya Paramita, Jakarta, 2005
- Sarwoto, *Dasar-dasar organisasi dan management*, Ghalia Idonesi, Jakarta, 1968
- Sarjipto Raharjo, *Aneka Pustaka Hukum Masyarakat, Alumni*, Bandung, 1977
- SF. Marbun Dkk, *Dimensi-dimensi pemikiran hukum administrasi Negara*, UII Pres, Yogyakarta, 2001
- Sukarnao K, *Dasar-dasar manajemen*, Miswa, Jakarta, Tahun 1968
- Nasrullah, *Optimalisasi Peran Komisi Ombudsman Nasional dalam Rangka Mewujudkan Good Governace*, makalah disampaikan pada diskusi bulanan dosen fakultas hukum Universitas mahamadiyah Yogyakarta, 18 mai 2002.
- Victor M, Sitomurang dan Jusuf Juhir, *Aspek hukum Pengawasan Melekat Dalam Lingkungan Aparatur Pemerintah*, Rineka Cipta, 1994
- Sujata, Antonius. *Ombudman Indonesia : Masa lalu, sekarang dan masa mendatang* Jakarta, Komisi Ombudsman Nasional, 2002

B. Peraturan Perundang-undangan

1. Pasal 4 ayat (1) Undang-undang Dasar 1945;
2. Undang-undang Nomor 43 tahun 1999 tentang perubahan Atas Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian(Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3890)
3. Undang-undang Nomor 37 tahun 2008 tentang Ombudsman Republik Indonesia(Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4899)
4. Peraturan Pemerintah Nomor 10 tahun 1979 tentang Penilaian Pelaksana Pekerjaan Pegawai(Lembaran Negara Tahun 1979 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3176)
5. Peraturan Pemerintah Nomor 30 tahun 1980 tentang Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil;
6. Instruksi Presiden Nomor 15 Tahun 15 tahun 1988 tentang Pedoman Pelaksana Pengawasan;
7. Surat Edaran Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Republik Indonesia tanggal 1 mei 1983 Nomor SE.117/K/1985 tentang Norma Pemeriksaan Aparat Pengawasan Fungsional.
8. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 15 tahun 1984 tentang Susunan Organisasi Departemen, sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Indonesia Nomor 35 Tahun 1987.
9. Peraturan Gubernur DIY Nomor 21 tahun 2008 tentang Organisasi dan